

Evaluasi Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

Oleh:

¹ Priyono; ² Kliwon Hidayat; ³ Rosihan Asmara

¹²³. Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email. priyono123@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dari Program Padat Karya Tunai Desa peneliti melakukan penelitian agar bemanfaat bagi stake holder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Methods dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu Kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling melibatkan pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan khusus dan tidak secara acak, dengan harapan dapat mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Input Program Padat Karya Tunai Desa dalam penelitian ini melalului beberapa tahapan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan Program PKTD di Desa Gayam yaitu melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), adapun penyusunan RKP sendiri melalui beberapa tahapan yaitu: 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (PPD) 2) Musyawarah Tim Penyusun, Pengukuran lokasi Pembangunan dan pembuatan RAB semua Kegiatan 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 4) Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa. kemudian tahapan pelaksanaan yang dilakukan di bulan April dan Bulan Mei. Keterlibatan Keluarga miskin dan marjinal: berdasarkan keikutsertaan Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang mengikuti sebanyak 30 orang responden dengan persentase 42,85 %, sedangkan KK dan anggota keluarga yang tidak mengikuti Program sebanyak 40 orang responden dengan persentase sebesar 57,15 %.

Kata Kunci: Evaluasi; Program Padat Karya Tunai Desa; Pemberdayaan

Abstract

This research aims to analyze the issues arising from the Cash for Work Village Program, researchers conducted a study to benefit stakeholders. This research utilizes a Mixed Methods approach by combining both quantitative and qualitative methods. The research employs purposive sampling, a technique that involves selecting research subjects based on specific criteria, not randomly, with the aim of obtaining samples relevant to the research objectives. Data collection techniques include questionnaires, interviews, observations, and documentation. The implementation of the Village Cash For Work Village Program in this study goes through several stages, namely the Planning Stage, which is the most important stage in the implementation of the PKTD Program in Gayam Village. This involves the preparation of the Village Government Work Plan (RKP), which itself goes through several stages: 1) Village Meeting for Development Planning (PPD) Team Meeting for Planning, 2) Measurement of Construction Sites, and Preparation of the Budget Plan for all Activities 3) Development Planning Meeting (Musrenbang) 4) Village Meeting for the Establishment of the Village Government Work Plan. Subsequently, the implementation stage takes place in April and May. Involvement of poor and marginalized families: based on the participation of heads of households and family members, 30 respondents participated, representing 42.85%, while 40 respondents did not participate in the program, representing 57.15%.

Keywords: Evaluation; Village Cash Work Program; Empowerment

PENDAHULUAN

Hambatan dalam mengembangkan ekonomi suatu negara terjadi sebagai hasil dan dampak dari masalah kemiskinan. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar kekurangan pendapatan dan sumber daya untuk menjaga mata pencaharian yang berkelanjutan. Dampak dari kemiskinan termasuk kelaparan dan kekurangan gizi, keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, adanya diskriminasi sosial dan pengucilan, serta kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan (Hasan & Azis, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun kebutuhan non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, dengan jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin (P0) pada September 2022 adalah 9,57%, atau sekitar 26,36 juta orang. Angka ini meningkat sebanyak 0,20 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022, tetapi menurun sebanyak 0,14 juta orang dibandingkan dengan September 2021. Tingkat kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan, dengan 12,36% dari penduduk pedesaan hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan 7,53% dari penduduk perkotaan. Seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021-September 2022

| Wilayah | Presentase Penduduk Miskin (PO) menurut daerah | | | |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2021 | | 2022 | |
| | Semester 1 (Maret) | Semester 2 (September) | Semester 1 (Maret) | Semester 2 (September) |
| Kota | 7.89 | 7.60 | 7.50 | 7.53 |
| Desa | 13.10 | 12.53 | 12.29 | 12.36 |
| Kota + Desa | 10.14 | 9.71 | 9.54 | 9.57 |

Sumber: diolah dari <https://www.bps.go.id/>

BPS juga melaporkan bahwa kemiskinan tidak terdistribusi merata di seluruh negeri. Jumlah orang miskin terbanyak berada di Jawa, dengan 13,85 juta orang atau 52,96% dari total jumlah orang miskin di Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki jumlah orang miskin terbanyak. BPS menggunakan Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1) untuk mengukur kesenjangan pengeluaran rata-rata setiap orang miskin dari garis kemiskinan. Indeks P1 pada September 2022 adalah 3,89 di Kalimantan Selatan.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal mencakup perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kondisi sosial, struktur sosial, serta kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata. Sementara itu, faktor internal meliputi tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, dan keterbatasan peluang kerja.

Pemerintah Kabinet Kerja telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan Indonesia yang dikenal dengan istilah Nawa Cita. Salah satu fokus dari Prioritas ketiga pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pembangunan di daerah pinggiran dengan memberdayakan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan peran yang lebih aktif kepada desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan prioritas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan.

Penggunaan dana desa dalam rangka program dan kegiatan pembangunan desa yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan infrastruktur. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian dan berdampak besar terhadap pembangunan di daerah. Menurut penelitian oleh Tim LPEM-PSEKP-PSP yang dikutip dalam Wibowo (2014), salah satu cara yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, dan penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dengan baik, akan meningkatkan kondisi pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja, akses lapangan kerja, dan kemakmuran secara nyata (Atmaja & Mahalli, 2015).

Dana Desa dialokasikan secara prioritas untuk mendukung program dan kegiatan yang bertujuan pemberdayaan masyarakat desa, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, sehingga desa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pemberdayaan telah menjadi fokus utama dalam pembahasan tentang prioritas pembangunan sejak awal tahun 1990-an.

Penelitian telah menunjukkan bahwa pemberdayaan memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat dan pemberdayaan keluarga (Hughes, 2015). Hughes juga menyimpulkan bahwa masalah yang ada di pedesaan tidak dapat segera diatasi, tetapi melalui pemberdayaan, kita dapat menciptakan dasar untuk merancang program, layanan, dan kebijakan yang memiliki potensi manfaat. Selanjutnya, dalam penelitian oleh Wahyono, et al. (dalam Nugroho dan Surjono, 2008), disebutkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities) sebagai sistem yang mampu mengatur diri mereka sendiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan peran kepada individu-individu dalam masyarakat, bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku yang memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, termasuk peningkatan subsidi untuk energi dan makanan, perbaikan infrastruktur, dan program bantuan sosial.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa. PKTD merupakan kegiatan yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa, terutama yang berada dalam kondisi miskin dan marginal. Program ini memiliki sifat yang produktif dengan menekankan penggunaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan kepada peserta. Tujuan dari PKTD adalah meningkatkan daya beli, mengurangi tingkat kemiskinan, dan secara bersamaan mendukung upaya penurunan angka stunting.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga merupakan program pemberdayaan untuk masyarakat miskin dan marginal yaitu keluarga dengan pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan, sementara kelompok marginal dapat mencakup mereka yang berada dalam situasi sosial atau ekonomi yang sangat sulit dengan cara Swakelola yang bertujuan menciptakan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di desa (Setiawan & Megawati, 2022)

PKTD dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (SKB Empat Menteri): Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/Kmk.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan mampu menjadi payung hukum sekaligus pelaksanaan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Tunai Desa di desa desa seluruh Indonesia dengan kekuatan Dana Desa yang dimiliki.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diluncurkan pada tahun 2018 harapannya adalah semua desa dapat memahami dan melaksanakan program tersebut secara maksimal, namun dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul, diantaranya, Perencanaan kurang baik, Hasil pekerjaan dari program PKTD kurang berkualitas, Program PKTD tidak menguntungkan Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, Perencanaan Pembangunan masih kesulitan dalam mengimplementasikan program PKTD, sasaran

program PKTD yang belum terdata dengan baik serta PKTD tidak dapat diterapkan pada semua kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, karena dalam pelaksanaannya desa harus menganggarkan minimal 30% dari kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa,

Penelitian terdahulu seputar PKTD pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian (Herdiana, 2019) menyimpulkan bahwa faktor kedekatan masyarakat dengan aparatur desa, dalam beberapa kasus menyebabkan kelompok sasaran PKTD tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat yaitu masyarakat miskin yang rata didominasi oleh petani, buruh tani, masih terdapat masyarakat yang bukan kategori miskin dan marginal namun terdaftar sebagai pekerja dalam program PKTD. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Kurnia & Widhiasthini, 2021), yang mengkorelasikan Program padat karya Tunai Desa dengan peningkatan skill pekerja PKTD agar kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga.

Penelitian tentang Evaluasi Program Padat Karya Tunai Desa menjadi sangat penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai dari Padat karya Tunai itu sendiri diantaranya, Pemberdayaan masyarakat kesenjangan sosial antara yang miskin dan marginal dengan yang kaya, mengurangi pengangguran sementara dan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Selain itu diharapkan para stakeholders dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kebijakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap program padat karya tunai desa, namun dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya evaluasi yang baik..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, Pendekatan penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif dari program PKTD 2022 secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pemilihan Lokasi penelitian di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Metode pemilihan lokasi dilakukan secara perpusive atau disengaja, didasari oleh pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa tertinggi di Kabupaten Bojonegoro adapun Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pengalokasian Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan dari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.

Penentuan sampel keluarga miskin peserta dan non peserta PKTD 2022 dilakukan menggunakan teknik Simple Random Sampling (Acak Sederhana) dan Proporsional. Besarnya sampel keluarga peserta Program PKTD adalah 30 orang dan non peserta PKTD

2022 adalah 40 keluarga, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 70 keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, pengamatan dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam pendekatan campuran (mixed methods) terdiri dari analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan komparasi antara rencana program dengan implementasi program dan capaian tujuan program menggunakan tabel silang. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles-Hubermans.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Input Program PKTD tahun 2022

Program Padat Karya Tunai Desa telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Gayam sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, namun semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan harus memulai tahap pertahap yang dimulai dengan tahap perencanaan yaitu melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), adapun penyusunan RKP sendiri melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (PPD)

Musyawarah ini adalah awal dari sebuah perencanaan Pembangunan yang diprakarsai oleh BPD untuk menampung semua aspirasi masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan.

2. Musyawarah Tim Penyusun, Pengukuran lokasi Pembangunan dan pembuatan RAB semua Kegiatan

Setelah tim Penyusun RKP Desa ditetapkan oleh kepala Desa maka tim penyusun mulai bekerja dengan pengukuran lokasi kegiatan pembangunan, membuat RAB pada semua kegiatan.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Dalam tahap ini kepala desa melalui tim penyusun menyampaikan prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun berikut dengan Rencana Anggaran Biaya disesuaikan dengan perkiraan pendapatan desa dan RPJM Desa.

4. Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahapan ini merupakan tahapan penting karena menjadikannya Rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan permusyawaratan Desa.

Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan program padat karya tunai desa bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perencanaan program padat karya tunai desa. Apa yang disampaikan Kepala Desa terkait dengan kendala tersebut merupakan hal yang sangat wajar mengingat banyak faktor yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan yang didapat, diantaranya modal pelatihan, dan juga koordinasi lintas sector baik itu pembinaan dari Kecamatan, Kabupaten maupun pendampingan langsung oleh Pendamping Desa dari Kementerian:



Gambar 1. Siklus Perencanaan Desa

Sesuai dengan Data Damisda Pada Tahun 2022 maka KK Miskin di Desa Gayam Kecamatan Gayam adalah 127 KK. Daftar orang miskin yang secara musyawarah dan mufakat telah diputuskan melalui forum Musyawarah Desa kemudian dicantumkan dalam Keputusan Kepala Desa Gayam.

Dalam penyusunan RKPDesa pemerintah Desa menetapkan beberapa prasarana yang akan dibangun namun hanya tiga kegiatan pembangunan yang dipadatkaryakan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Prasarana yang direncanakan untuk program PKTD 2022 di desa Gayam, Kecamatan Gayam, Bojonegoro

| No. | Jenis Kegaitan PKTD | Volume Kegiatan | Waktu pelaksanaan | Dusun |
|-----|--|--|-------------------|-------------|
| 1. | Jalan Usaha Tani (m) | Panjang 400 M & Lebar 2 (m ²)* | April | Gayam |
| 2. | Drainase Vero cement (m) | (P. 300 + L. 0,6) m ² | April | Sumurpandan |
| 3. | Tembok Penahan Tanah (m ²) | P100 M & 1 (m) | Juli | Sumurpandan |

Sumber : Data Primer (2024) diolah

Deskripsi ini menunjukkan bahwa kegiatan prasarana yang direncanakan dalam program PKTD 2022 berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang penting bagi desa, seperti jalan usaha tani, drainase, dan tembok penahan tanah, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Gayam dan Sumurpandan.

Dana Desa (DD) yang dicantumkan dalam APB Desa Gayam pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 900.240.000,0 dan yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana (JUT,DV,TPT) adalah sebesar Rp 513.715.300,0 (57%) dari RABPDes. Alokasi dana masing-masing prasarana adalah Rp 250.256.200,0 untuk Jalan usaha tani, Rp159.332.000 untuk drainase vero cement dan Rp 104.127.100,0 untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah. Sedangkan jumlah keluarga yang tergolong miskin dan marginal di desa Gayam

menyebar di 8 RW dengan proporsi berkisar antara 10-15 %. RW yang terbanyak KK keluarga miskin dan marjinal adalah RW 8, sedangkan RW terendah proporsi KK miskin dan marginal adalah RW 2 dan RW 7. Jumlah KK miskin dan marjinal secara keseluruhan sebanyak 127 KK.

Input program yang meliputi Alokasi Dana Program adalah Rp. 513.715.300 (57%) dari Dana Desa sebesar Rp. 900.240.000. Ini berarti bahwa pada tahun 2022, alokasi dana untuk Program PKTD adalah sebesar Rp. 513.715.300, yang merupakan 57% dari total Dana Desa yang tersedia. Adapun Prasarana yang Akan Diperbaiki yaitu:

1. Jalan Usaha Tani: Terdapat rencana pembangunan jalan usaha tani dengan panjang 400 meter dan lebar 2 meter. Dana yang dialokasikan untuk ini adalah Rp. 250.256.200, yang merupakan 48,7% dari total alokasi dana program.
2. Drainase: Rencana perbaikan/pembangunan drainase dengan panjang 288 meter dan lebar 0,6 meter. Dana yang dialokasikan untuk ini adalah Rp. 159.332.000, yang merupakan 31% dari total alokasi dana program.
3. Tembok Penahan Tanah: Rencana pembangunan tembok penahan tanah dengan panjang 100 meter dan tinggi 1 meter. Dana yang dialokasikan untuk ini adalah Rp. 104.127.100, yang merupakan 20,3% dari total alokasi dana program.
4. Daftar Calon Tenaga Kerja (SDM):
5. Ada daftar calon tenaga kerja, dan 50% dari jumlah Keluarga Miskin (KK) di Desa Gayam akan menjadi tenaga kerja dalam program ini.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada bulan April dan bulan Juli. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Usaha Tani dilaksanakan pada bulan April 2022 terletak di Dusun Gayam RT: 010 / RW 002 dengan durasi waktu pelaksanaan 45 Hari melibatkan 16 Pekerja KK miskin. Kegiatan pembangunan yang berada di Dusun Gayam melibatkan Keluarga miskin dari 3 Dusun yaitu Dusun Gayam 6 Orang, Dusun Kaliglonggong 5 Orang dan Dusun Temlokorejo 2 Orang

Pelaksanaan Pembangunan Drainase Vero cement, Pembangunan Drainase Vero cement dilaksanakan pada bulan April 2022 di Dusun Sumurpandan RT: 19 RW: 004 Kecamatan Gayam, dengan durasi waktu pelaksanaan 30 hari dengan melibatkan 16 orang pekerja (Keluarga Miskin). Kegiatan pembangunan Drainase Vero cement yang berada di Dusun Sumurpandan hanya melibatkan Keluarga miskin dari 1 Dusun yaitu Dusun Sumurpandan itu sendiri sebanyak 16 Orang, Dusun.

Pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah, Pembangunan Tembok Penahan Tanah dilaksanakan pada bulan April 2022 di Dusun Sumurpandan RT: 016 RW: 003 Kecamatan Gayam, dengan durasi waktu pelaksanaan 30 hari dengan melibatkan 16 orang pekerja (Keluarga Miskin). Kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah yang berada di Dusun Sumurpandan hanya melibatkan Keluarga miskin dari 1 Dusun yaitu Dusun Sumurpandan itu sendiri sebanyak 16 Orang, Dusun.

Lama Pelaksanaan Pembangunan Prasarana PKTD Tahun 2022 dapat ditunjukkan dari jumlah hari kerja yang diperlukan untuk pembangunan prasarana Jalan Usaha Tani (JUT), Drainase Vero cement (DV), dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022. Data ini disajikan

berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti, jumlah orang yang terlibat, jumlah hari kerja, total Hari Orang Kerja (HOK), dan lokasi dusun, Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan jalan usahatani, drainase verocement, dan Tembok Penahan Tanah berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan volume kegiatan. Dari 54 KK miskin yang terlibat pada kegiatan Jalan Usaha Tani di Dusun Gayam adalah 14 Orang dengan total HOK 630, sedangkan yang terlibat pada pembangunan Drainase Vero cement di Dusun Sumurpandan adalah 16 orang KK Miskin dengan total HOK 480, adapun untuk kegiatan Tembok Penahan Tanah di Dusun Sumurpandan adalah 16 orang KK miskin dengan total HOK 320.

Keterlibatan Orang Miskin dan Marjinal dalam Pelaksanaan PKTD

Desa Gayam adalah salah satu diantara tiga Desa yang ditempati explorasi minyak Bumi yang dioperatori oleh Exxon Mobil Cepu Ltd. Yaitu perusahaan raksasa dari USA, sebelum kisaran tahun 2001 masyarakat Desa Gayam mengadalkan pada sector pertanian dalam memenuhi kebutuhannya, namun sejak pemerintah Indonesia membebaskan lahan warga untuk kegiatan eksplorasi tersebut pada kisaran tahun 2001 semua masyarakat terbuai, mereka menjual tanah mereka kemudian dibelikan mobil, rumah dan barang lain, untuk masyarakat yang sadar maka mereka membelikan hasil pemebelian lahan tersebut untuk membeli tanah lagi di Desa lain. Mereka sudah terbuai dengan iming iming akan dipekerjakan di perusahaan raksasa tersebut, dalam perkembangannya pada tahun 2008 konstruksi sudah dimulai dan hampir semua warga Gayam yang usianya produktif ikut semua dalam project tersebut, namun ketika memasuki tahun 2014 setelah konstruksi selesai banyak warga yang diputus pekerjaanya karena sudah produksi sehingga mereka harus kembali lagi pada pekerjaan awalnya yaitu menjadi petani, dengan pendapatan turun maka secara otomatis kemiskinan kembali naik sehingga masyarakat Desa Gayam banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, tercatat pada tahun 2022 dalam Data Miskin Daerah ada 127 Keluarga. Sehingga data inilah yang peneliti pakai sebagai populasi penelitian saya bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat miskin dalam program padat Karya Tunai Desa.

Peserta program padat karya tunai desa di desa Gayam berdasarkan keikutsertaan Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang mengikuti sebanyak 30 orang responden dengan persentase 42,85 %, sedangkan KK dan anggota keluarga yang tidak mengikuti Program sebanyak 40 orang responden dengan persentase sebesar 57,15 %, adapun anggota keluarga yang ikut adalah 0 orang dengan persentase 0% dan anggota keluarga yang tidak ikut adalah 70 orang dengan persentase 100%.

Adapun yang terlibat dalam program padat karya tunai desa adalah kepala keluarganya saja, adapun anggota keluarga masih belum terlibat, karena alasan umur, perempuan dan karena sudah tua, perempuan tidak terlibat dalam program tersebut karena masyarakat desa masih menganggap tabu jika perempuan bekerja di bangunan. Program padat karya tunai desa di desa Gayam berdasarkan siapa yang meminta untuk terlibat adalah sebanyak 30 orang responden diajak oleh tim pelaksana kegiatan dengan persentase sebesar 100% dari keluarga miskin yang terlibat, adapun kepala desa maupun perangkat desa tidak ikut mengajak karena sudah didelegasikan kepada tim pelaksana kegiatan, list pekerja itu dari kepala Desa namun tim pelaksana kegiatan tidak akan mengurangi dan menambah peserta padat karya yang telah dicanangkan oleh kepala desa dan perangkat

desa sehingga keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program tersebut sesuai dengan perencanaan.

Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa

Implementasi program padat karya tunai desa di desa Gayam berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti peserta, Drainase Vero cement dan Tembok Penahan Tanah diikuti masing masing sebanyak 16 orang responden dengan persentase masing masing sebesar 27%, hal ini didasarkan pada lokasi yang dibangun untuk kegiatan tersebut yaitu di Dusun Sumurpandan, kemudian yang berlokasi di Gayam yaitu kegiatan JUT sebanyak 14 orang responden dengan persentase sebesar 23%.

Implementasi program padat karya tunai desa di Desa Gayam tahun 2022 berdasarkan siapa yang meminta peserta untuk terlibat adalah sebanyak 30 orang responden diajak oleh tim pelaksana kegiatan dengan persentase sebesar 100% dari keluarga miskin yang terlibat, adapun kepala desa maupun perangkat desa tidak ikut mengajak karena sudah didelegasikan kepada tim pelaksana kegiatan.

Kegiatan PKTD di desa Gayam dari keterlibatan masyarakat tidak serta merta keputusan kepala desa saja namun timlak juga bekerja sesuai porsinya, namun yang menjadi catatan peneliti bahwa kegiatan pembangunan apa saja maka yang menjadi tim Pelaksanannya adalah Staf Kaur. Peserta program padat karya tunai desa di Desa Gayam pelaksanaan kegiatan JUT dilaksanakan pada bulan April dengan jumlah HOK 630 sedangkan kegiatan Drainase Vero cement dilaksanakan pada bulan april dengan 480 HOK, adapun kegiatan pembangunan tembok penahan tanah dilaksanakan pada bulan juli dengan 320 HOK.

Keluaran Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Gayam

Tiga kegiatan yang dicanangkan dalam Program Padat Karya Tunai Desa telah dilaksanakan pada bulan April dan Juli tahun 2022.

1. Jalan Usaha Tani telah dilaksanakan dengan baik namun dalam pelaksanaannya sudah sesuai target hari yang dicanangkan.
2. Drainase Vero cement yang dicanangkan menjadi kegiatan andalan untuk Program padat Karya Tunai Desa telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
3. Tembok Penahan Tanah yang dicanangkan menjadi kegiatan andalan untuk Program padat Karya Tunai Desa telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Gambaran mengenai prioritas pengeluaran pekerja di Desa Gayam, dengan kebutuhan pokok seperti beras dan keperluan lain serta pembayaran hutang sebagai prioritas utama dalam penggunaan upah mereka. Seluruh responden yang terlibat dalam survei ini menunjukkan pola yang konsisten dalam pengalokasian upah mereka, upah yang diterima Keluarga miskin dapat dilihat pada tabel berikut. Keluaran atau output dari program padat karya tunai desa di desa Gayam menurut upah yang diterima per orang perhari adalah Rp. 85.000 dikali 45 HOK dalam pelaksanaan kegiatan JUT, masing masing peserta mendapatkan upah total Rp. 3.825.000 sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Drainase vero cement menurut upah yang diterima per orang perhari adalah Rp. 85.000 dikali 30 HOK masing masing peserta mendapatkan upah total Rp. 2.550.000. adapun dalam pelaksanaan kegiatan Tembok Penahan Tanah menurut upah yang diterima per orang

perhari adalah Rp. 85.000 dikali 20 HOK masing masing peserta mendapatkan upah total Rp. 1.700.000.

Program ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat, pelaksanaan PKTD pada masa setelah panen memberikan tambahan pendapatan, sehingga mengurangi pengangguran pasca panen, sedangkan upah rata rata yang diterima per KK dalam program tersebut disimpulkan bahwa upah yang diterima KK miskin yang terlibat adalah Rp. 3.825.000 14 Orang KK dan Rp. 4.750,000, dengan demikian jika dihitung rata rata adalah Rp. 4,287,000

Analisis Dampak program padat Karya tunai desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Dampak Program Padat Karya Tunai Desa Bagi Keluarga miskin

Setiap program pasti mempunyai dampak yang bermanfaat, begitu juga dengan Program Padat Karya juga mempunyai dampak yang baik bagi keluarga miskin maupun bagi warga terdampak, adapun bagi keluarga miskin dalam penggunaan upah yang diterima oleh para pekerja dalam kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Gayam pada tahun 2022 yang mencakup tiga kategori utama penggunaan upah serta persentase dari upah yang diterima dan persentase responden yang menggunakan upah mereka. Output dari program padat karya tunai desa di desa Gayam berdasarkan manfaat upah yang diterima keluarga miskin yang terlibat adalah, untuk membeli beras 25,9 % dari upah yang diterima, untuk kebutuhan lainnya 56,8 % dari upah yang diterima dan untuk membayar hutang 27,9 % dari total upah yang diterima berdasarkan pendapat semua responden.

Dampak lain yang dirasakan Peserta Program Padat Karya Tunai Desa diukur berdasarkan dua aspek utama: kemanfaatan program dan kemanfaatan upah, yang dinilai oleh responden dari keluarga miskin/marjinal:

Tabel 3. Dampak Program Padat Karya Tunai Desa Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, 2022 bagi Keluarga Miskin/Marjinal berdasarkan Kemanfaatan Program dan Kemanfaatan Upah

| No. | Program PKTD | Responden | Jumlah Orang |
|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Kemanfaatan Program | Sangat bermanfaat | 30 |
| 2. | Kemanfaatan Upah | Sangat bermanfaat | 30 |
| | Total | | 60 |

Sumber : Data Primer (2024) diolah

Kemudian Hasil berikutnya yaitu untuk menganalisis dampak dari Program Padat Karya Desa (PKTD) di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dari data yang saya peroleh dari semua responden yang terlibat dalam program tersebut adalah sangat bermanfaat bagi keluarga miskin terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan membayar hutang serta mengatasi pengangguran

Hasil analisis di atas menunjukkan dampak Program Padat Karya Desa (PKTD) di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dari data yang saya peroleh bahwa hasil dari program PKTD digunakan untuk membeli beras, kebutuhan sehari hari dan juga membayar hutang,

Selain manfaat program Kebermanfaatan Prasarana yang dibangun adalah bagian dari tujuan membangun desa yang bisa langsung dirasakan oleh penerima manfaat infrastruktur, ada 3 Responden di masing masing wilayah kegiatan pembangunan prasarana

melalui Program Padat Karya Tunai Desa bahwa kemanfaatan prasarana di bangun meliputi Jalan Usaha tani bermanfaat memudahkan transportasi Hasil Pertanian, Memudahkan distribusi pupuk dan alat pertanian. Sedangkan tembok penahan tanah bermanfaat untuk mencegah longsor, melindungi lahan pertanian dan mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, adapun untuk Drainase verocement bermanfaat untuk mencegah banjir, meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Adapun dampak baik dari pembangunan infrastruktur Drainase Verocement *adalah* mencegah banjir, meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya keterlibatan keluarga miskin dan marginal di Desa Gayam Kecamatan Gayam sudah baik karena semua sudah dilibatkan kecuali perempuan dan usia rentan. Perencanaanya cukup baik dan sesuai dengan ketentuan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Juknis. Adapun dalam tahap pelaksanaanya Pemerintah Desa Gayam memilih ketika pada saat setelah Panen sehingga dapat mengurangi pengangguran. Keluaran (Output) Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Gayam, upah yang diterima oleh penerima manfaat program banyak dan cukup untuk menjadi tambahan penghasilan. Dampak Program dan dampak bangunan fisik yang dirasakan, secara umum peserta program padat karya sangat merasakan kemanfaatan dari program tersebut baik dari penghasilan maupun dari sisi kemanfaatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4), 14847.
- Data BPS. Tersedia di <https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-daerah.html>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Hughes. (2015). *Buzz Marketing*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). Evaluasi kebijakan padat karya tunai pada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(1), 148–161.
- Setiawan, M. Y. A., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 665–680.
- Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (SKB Empat Menteri): Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/Kmk.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. (2008). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Publishing.
- Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional

- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka
- Wahab, Soloichin. A. (2004). *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara
- Wardan, Anang Solihin. (2009). *Peduli Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya